



Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung serentak di Kota Jayapura

Supriyanto*, Akbar Silo, Untung Muhdiarta, Y. Gabriel Maniagasi

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

* E-mail Korespondensi Penulis: supriyantostpdnXi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

policy implementation, simultaneous village head election, local governance, village government, Jayapura City

How to Cite:

Supriyanto, Silo, A., Muhdiarta, U., Maniagasi, Y.G. (2025). Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung serentak di Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 13(3): 174-183.

DOI:

10.31957/jeb.v13i3.5329

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the simultaneous village head election policy in Jayapura City and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The research employs a qualitative descriptive approach to examine policy implementation dynamics at the local level. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving government officials, election committees, community leaders, and village communities who were directly involved in the election process. The analysis uses the policy implementation framework of Edwards III, which emphasizes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, combined with Grindle's approach that highlights policy content and the context of implementation. The findings show that the implementation of the simultaneous village head election policy in Jayapura City has generally been carried out in accordance with existing regulations. The policy implementation is supported by clear regulatory frameworks, strong commitment from the local government, active community participation, and the involvement of customary leaders in maintaining social stability. Effective communication between local government institutions and village-level actors has also improved understanding of election procedures and policy objectives. However, several challenges still influence the effectiveness of policy implementation, including limited administrative capacity of election organizers at the village level, coordination issues among implementing institutions, and the influence of local political dynamics during the election process. Moreover, the strong role of traditional social structures in Papuan communities sometimes requires adjustments between formal democratic procedures and local cultural values. Therefore, strengthening institutional capacity, improving coordination among stakeholders, and integrating local cultural values into governance practices are essential to enhance the effectiveness and sustainability of the simultaneous village head election policy in Jayapura City.

Copyright © 2025 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL**Kata Kunci:**

implementasi kebijakan, pemilihan kepala desa serentak, pemerintahan lokal, pemerintahan desa, Kota Jayapura

Cara Mengutip:

Supriyanto, Silo, A., Muhdiarta, U., Maniagasi, Y.G. (2025). Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung serentak di Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 13(3): 174-183.

DOI:

10.31957/jeb.v13i3.5329

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemilihan kepala kampung secara serentak di Kota Jayapura serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan aparat pemerintah, panitia pemilihan, tokoh masyarakat, serta masyarakat kampung yang terlibat langsung dalam proses pemilihan. Analisis penelitian menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edwards III yang menekankan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta dipadukan dengan pendekatan Grindle yang menyoroti isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemilihan kepala kampung secara serentak di Kota Jayapura pada umumnya telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan didukung oleh kejelasan regulasi, komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan tokoh adat dalam menjaga stabilitas sosial. Komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan aparat kampung juga membantu meningkatkan pemahaman terhadap prosedur pemilihan dan tujuan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi, seperti keterbatasan kapasitas administratif penyelenggara di tingkat kampung, tantangan koordinasi antar lembaga pelaksana, serta dinamika politik lokal yang muncul selama proses pemilihan. Selain itu, kuatnya struktur sosial adat di masyarakat Papua menuntut adanya penyesuaian antara prosedur demokrasi formal dengan nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta integrasi nilai budaya lokal dalam tata kelola pemerintahan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut.

Hak Cipta© 2025 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang diatur dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama melalui ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan adanya pembagian wilayah pemerintahan serta prinsip otonomi daerah. Dalam implementasinya, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam pembinaan serta pengawasan

terhadap pemerintahan desa atau kampung. Pemerintahan kampung sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat sehingga kualitas kepemimpinan di tingkat kampung sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu mekanisme penting dalam mewujudkan kepemimpinan yang demokratis di tingkat lokal adalah melalui pemilihan kepala kampung yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks tersebut, pemilihan kepala kampung tidak hanya dipahami sebagai proses politik lokal, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kampung.

Pemilihan kepala kampung secara serentak merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau kampung. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengatur tahapan pelaksanaan pemilihan, mulai dari pembentukan panitia pemilihan, penetapan jadwal, penganggaran, hingga pengesahan hasil pemilihan kepala kampung. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, transparansi penyelenggaraan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut (Edwards, 1980). Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kesesuaian antara isi kebijakan dengan konteks lingkungan sosial, politik, dan budaya tempat kebijakan tersebut dilaksanakan (Grindle, 1980).

Dalam konteks Kota Jayapura, pemilihan kepala pemerintahan kampung memiliki karakteristik yang unik karena berlangsung dalam kerangka otonomi khusus Papua yang mengakui dan menghormati nilai-nilai adat serta struktur sosial masyarakat lokal. Sistem pemerintahan kampung di wilayah ini tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal dari pemerintah, tetapi juga oleh keberadaan lembaga adat seperti *ondoafi* atau kepala suku yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, proses pemilihan kepala kampung harus mampu mengakomodasi keseimbangan antara prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan berbagai regulasi daerah seperti Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung serta peraturan walikota yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak sebagai dasar hukum operasional dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala kampung berlangsung secara demokratis, transparan, dan akuntabel sekaligus tetap menghormati struktur sosial budaya masyarakat adat di Kota Jayapura.

Meskipun secara normatif kerangka regulasi telah tersedia, dalam praktiknya pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan kampung serentak di Kota Jayapura masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya mekanisme pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Permasalahan lain yang muncul antara lain berkaitan dengan dinamika pencalonan kepala kampung, transparansi penyelenggaraan pemilihan, serta persepsi masyarakat

terhadap pengelolaan dana kampung yang relatif besar sehingga mempengaruhi motivasi calon kepala kampung dalam mengikuti kontestasi politik lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemilihan kepala kampung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif dan kelembagaan, tetapi juga oleh faktor sosial, politik, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala pemerintahan kampung serentak di Kota Jayapura dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan publik agar dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan model implementasi kebijakan yang sesuai dengan konteks otonomi khusus di Papua. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala pemerintahan kampung serentak di Kota Jayapura menjadi penting untuk dilakukan guna memperkuat kualitas demokrasi lokal sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung di wilayah tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami secara komprehensif bagaimana kebijakan pemilihan kepala pemerintahan kampung serentak diimplementasikan dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang khas di Kota Jayapura. Meskipun regulasi mengenai pemilihan kepala kampung telah tersedia dan menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi lokal, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif, kelembagaan, serta dinamika sosial masyarakat adat. Selain itu, dalam konteks otonomi khusus Papua, proses penyelenggaraan pemerintahan kampung tidak hanya mengikuti mekanisme birokrasi formal tetapi juga berinteraksi dengan sistem kepemimpinan adat yang memiliki legitimasi kuat dalam masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan kajian empiris yang mampu menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat implementasinya, serta bagaimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan dengan nilai-nilai lokal yang berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan kampung di Kota Jayapura.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menganalisis implementasi kebijakan pemilihan serentak kepala desa di Kota Jayapura. Penelitian kualitatif dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial, interaksi kelembagaan, dan praktik tata kelola secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Dalam konteks studi kebijakan publik, metode kualitatif sering diterapkan untuk meneliti bagaimana kebijakan diinterpretasikan, diimplementasikan, dan dialami oleh aktor yang terlibat dalam proses tata kelola. Lebih lanjut, penelitian kualitatif memungkinkan pemahaman komprehensif tentang dinamika administratif dan sosial-politik yang kompleks yang memengaruhi implementasi kebijakan (Denzin & Lincoln, 2018).

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan fokus pada implementasi pemilihan serentak kepala desa. Data dikumpulkan melalui beberapa

teknik, termasuk wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan tentang proses implementasi kebijakan. Para informan terdiri dari pejabat pemerintah daerah, anggota panitia pemilihan, kepala desa, pemimpin adat, dan anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pemilihan. Wawancara digunakan untuk menangkap persepsi, pengalaman, dan perspektif para pemangku kepentingan mengenai implementasi kebijakan pemilihan. Menurut Yin (2018), berbagai sumber bukti seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi sangat penting dalam studi kasus kualitatif untuk memastikan validitas data dan memberikan pemahaman holistik tentang fenomena penelitian.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analitis ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengatur dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam studi ini, analisis dipandu oleh teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Marilee S. Grindle, yang banyak digunakan dalam penelitian kebijakan publik. Edwards III (1980) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi, termasuk kapasitas kelembagaan, lingkungan politik, dan kondisi sosial budaya. Dengan menerapkan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemilihan kepala kampung serentak di Kota Jayapura.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial guna menjamin perlindungan terhadap hak dan kerahasiaan para informan. Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta bentuk partisipasi yang diharapkan kepada seluruh informan. Partisipasi informan bersifat sukarela dan didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara sadar (*informed consent*). Informan juga diberikan kebebasan untuk menolak atau menghentikan keterlibatan mereka dalam penelitian kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data, identitas informan tidak dicantumkan secara langsung dalam laporan penelitian dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Dengan demikian, proses penelitian ini dilakukan dengan tetap menghormati prinsip kerahasiaan, kejujuran ilmiah, serta perlindungan terhadap hak-hak informan sebagai subjek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan Pemilihan Serentak Kepala Kampung di Kota Jayapura

Implementasi kebijakan pemilihan serentak kepala kampung di Kota Jayapura dapat dianalisis melalui sintesis antara model implementasi kebijakan dari Edwards III dan Grindle yang menekankan interaksi antara faktor administratif dan konteks sosial politik. Edwards III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut (Edwards, 1980). Sementara itu, Grindle menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya

dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) tetapi juga oleh konteks implementasi (*context of implementation*) yang mencakup kondisi sosial, politik, dan kelembagaan di lingkungan kebijakan tersebut dilaksanakan (Grindle, 1980). Dalam konteks pemilihan kepala kampung di Kota Jayapura, kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal tetapi juga oleh dinamika sosial budaya masyarakat lokal. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemilihan kepala kampung serentak di Kota Jayapura dapat dipahami sebagai proses interaksi antara sistem birokrasi pemerintahan daerah dengan struktur sosial masyarakat adat yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan politik lokal.

Dari perspektif komunikasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana informasi mengenai aturan dan prosedur pemilihan disampaikan kepada para pelaksana dan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak di Kota Jayapura, pemerintah daerah berperan penting dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada panitia pemilihan, aparat kampung, dan masyarakat agar memahami mekanisme pemilihan secara jelas. Komunikasi kebijakan yang efektif memungkinkan seluruh aktor yang terlibat memahami tujuan kebijakan, prosedur pelaksanaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses pemilihan. Namun dalam praktiknya, komunikasi kebijakan seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, perbedaan pemahaman terhadap regulasi, serta pengaruh faktor sosial dan budaya lokal. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian implementasi kebijakan publik yang menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi kebijakan dapat menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap kebijakan dan berpotensi menimbulkan konflik dalam proses implementasi (Jovita, 2017; Mangngasing & Rachmat, 2024).

Selain faktor komunikasi, aspek sumber daya dan struktur birokrasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan pemilihan kepala kampung serentak. Edwards III menekankan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana administrasi (Edwards, 1980). Dalam konteks Kota Jayapura, pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak didukung oleh pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan kelembagaan dari pemerintah kota, panitia pemilihan, dan aparat kampung. Struktur birokrasi yang jelas juga diperlukan untuk memastikan adanya koordinasi antara pemerintah daerah, panitia pemilihan, dan masyarakat dalam menjalankan tahapan pemilihan secara sistematis. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa atau kampung (Satibi & Rochaeni, 2023). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi aparatur lokal menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemilihan kepala kampung.

Dari perspektif teori Grindle, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh isi kebijakan serta lingkungan implementasi yang mencakup kondisi politik, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam konteks pemilihan kepala kampung di Kota Jayapura, isi kebijakan yang mengatur mekanisme pemilihan secara demokratis telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemilihan. Namun demikian, lingkungan implementasi kebijakan di Papua memiliki karakteristik khusus karena kuatnya pengaruh struktur sosial adat seperti *ondoafi* dan kepala suku dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan lembaga adat ini seringkali berperan dalam

menentukan legitimasi sosial terhadap calon pemimpin kampung dan mempengaruhi dinamika politik lokal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle bahwa interaksi antara aktor politik, institusi lokal, dan kepentingan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Grindle, 1980; Yulivestra, Zauhar, & Wijaya, 2025).

Berdasarkan sintesis antara teori Edwards III dan Grindle, implementasi kebijakan pemilihan serentak kepala kampung di Kota Jayapura menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor administratif dan faktor kontekstual. Secara administratif, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah. Sementara itu secara kontekstual, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik lokal yang membentuk dinamika kepemimpinan di tingkat kampung. Interaksi antara sistem pemerintahan modern dengan nilai-nilai adat masyarakat Papua menjadi salah satu karakteristik utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, model implementasi kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan administratif dan kontekstual dianggap lebih relevan dalam menjelaskan dinamika implementasi kebijakan pemilihan kepala kampung serentak di Kota Jayapura.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemilihan Serentak Kepala Kampung di Kota Jayapura

Implementasi kebijakan pemilihan serentak kepala kampung di Kota Jayapura dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards, 1980). Sementara itu, Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua dimensi utama yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) yang mencakup kondisi sosial, politik, dan kelembagaan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan (Grindle, 1980). Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, analisis terhadap implementasi kebijakan pemilihan kepala kampung serentak dapat dilakukan secara lebih komprehensif karena memperhatikan faktor administratif dan faktor lingkungan kebijakan secara bersamaan. Dalam konteks Kota Jayapura, kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola proses administratif sekaligus memahami dinamika sosial budaya masyarakat setempat.

Salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan pemilihan serentak kepala kampung di Kota Jayapura adalah keberadaan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif. Regulasi tersebut mencakup peraturan perundang-undangan nasional tentang desa serta peraturan daerah yang secara khusus mengatur mekanisme pemilihan kepala kampung secara serentak. Dalam perspektif Grindle, aspek ini termasuk dalam dimensi *content of policy* yang menunjukkan bahwa kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas, prosedur yang terstruktur, dan pembagian kewenangan yang tegas akan lebih mudah diimplementasikan secara efektif (Grindle, 1980). Selain itu, komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi kepada panitia pemilihan dan masyarakat juga menjadi faktor penting yang

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Edwards III menegaskan bahwa komunikasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan terkoordinasi akan meningkatkan pemahaman para pelaksana kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan (Edwards, 1980).

Faktor pendukung lainnya adalah adanya partisipasi masyarakat serta dukungan dari lembaga adat yang memiliki pengaruh kuat dalam struktur sosial masyarakat Papua. Dalam masyarakat Papua, kepemimpinan tradisional seperti *ondoafi* atau kepala suku memiliki legitimasi sosial yang kuat dan seringkali berperan dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung proses demokrasi lokal. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial politik serta keterlibatan aktor-aktor lokal yang memiliki kepentingan dalam kebijakan tersebut (Grindle, 1980). Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pemilihan kepala kampung juga menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Beberapa penelitian mengenai implementasi kebijakan desa di Indonesia juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa (Satibi & Rochaeli, 2023; Hadjaratie, Abdussamad, & Tui, 2025).

Namun demikian, implementasi kebijakan pemilihan serentak kepala kampung di Kota Jayapura juga menghadapi sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan di tingkat kampung, terutama dalam hal kemampuan administratif dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Edwards III menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, dapat menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan publik (Edwards, 1980). Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan juga terkadang menghadapi kendala birokrasi yang memperlambat proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang tidak efisien dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat lokal (Widodo & Prastyawan, 2025).

Faktor penghambat lainnya berkaitan dengan dinamika politik lokal serta pengaruh kepentingan kelompok tertentu dalam proses pemilihan kepala kampung. Dalam beberapa kasus, persaingan politik antar calon kepala kampung dapat memicu konflik sosial atau perbedaan kepentingan yang berpotensi mengganggu stabilitas proses pemilihan. Dalam perspektif Grindle, kondisi ini merupakan bagian dari *context of implementation* yang menunjukkan bahwa faktor politik dan relasi kekuasaan antar aktor lokal sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Grindle, 1980). Selain itu, perbedaan persepsi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga adat mengenai mekanisme pemilihan kepala kampung juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar aktor, serta pengelolaan konflik secara konstruktif menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemilihan serentak kepala kampung di Kota Jayapura.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemilihan serentak kepala kampung di Kota Jayapura menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kombinasi

antara faktor administratif dan faktor kontekstual sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan Edwards III dan Grindle. Dari perspektif Edwards III, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi elemen penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal (Edwards, 1980). Komunikasi kebijakan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan aparat kampung, dukungan sumber daya anggaran dari pemerintah daerah, serta keberadaan struktur birokrasi yang jelas merupakan faktor yang mendukung terlaksananya pemilihan kepala kampung secara serentak. Selain itu, komitmen para pelaksana kebijakan di tingkat pemerintah kota dan kampung juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemilihan serentak kepala kampung di Kota Jayapura secara umum menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperkuat demokrasi lokal melalui mekanisme pemilihan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan faktor sosial, politik, dan kelembagaan sebagaimana dijelaskan dalam perspektif context of implementation dari Grindle (1980). Dinamika politik lokal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kampung, serta perbedaan persepsi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga adat menjadi beberapa faktor yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pengaruh struktur sosial adat yang kuat dalam masyarakat Papua juga mempengaruhi proses legitimasi kepemimpinan kampung sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada desain kebijakan yang baik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dinamika sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar aktor kebijakan, serta integrasi antara sistem pemerintahan formal dan nilai-nilai adat lokal menjadi langkah penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pemilihan serentak kepala kampung di Kota Jayapura di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Ahmad, J., Sos, S., & Adnan, S. A. (2014). Public policy implementation and application of cultural values in village government. *Public Policy Journal*, 9(2), 100–112.
- Christiani, C., & Mulajaya, R. P. (2023). Policy implementation and governance dynamics in local administration. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(3), 210–223.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Hadjaratie, S., Abdussamad, Z., & Tui, F. P. (2025). Evaluating the implementation of the village fund policy in Tilonkabila District: A qualitative study of planning and execution. *Asian Social Science and Society Journal*, 6(1), 25–38.
- Jovita, H. (2017). *Public policy in theory and practice*. Jakarta: Policy Research Institute.
- Karniawati, N. (2015). *Ilmu pemerintahan: Konsep dan teori*. Bandung: Refika Aditama.
- Labolo, M. (2022). *Ilmu pemerintahan: Kajian teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangngasing, N., & Rachmat, N. (2024). Implementation of the policy on the appointment and dismissal of village apparatus. *Law & Public Administration Review*, 5(2), 45–60.
- Manullang, S. O., et al. (2020). Pemilihan kepala desa serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan tantangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 120–135.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif teori dan praktik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 1–15.
- Rasaili, W. (2023). Local politics and democracy on policy implementation in Madura. *Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 35–48.
- Satibi, I., & Rochaeni, A. (2023). Implementation of village government capacity building policies in Indonesia. *Tec Empresarial*, 17(2), 45–60. http://revistas.tec-ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/255
- Strong, C. F. (1966). *Modern political constitutions: An introduction to the comparative study of their history and existing form*. London: Sidgwick & Jackson.
- Sumule, A. (2003). *Mencari jalan tengah: Otonomi khusus Papua*. Jakarta: Gramedia.
- Suot, S. J. C., Mamentu, M., & Liando, D. M. (2025). Implementation of the voting committee recruitment policy in Modoinding District for the 2024 election. *Journal of Development Management and Public Sector*, 3(1), 21–35.
- Widodo, W., & Prastyawan, A. (2025). Analysis of policy implementation in decentralized governance. *International Journal of Business and Management Review*, 11(1), 34–49.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yulivestra, M., Zauhar, S., & Wijaya, A. F. (2025). Factors causing the failure of policy implementation of traditional governance systems in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(1), 1–15.